

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 02/UJPPID-KT/VI/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Hotel Ballroom Hotel Novotel Balikpapan telah dilakukan Pengubahan Kualifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

DINAS PERHUBUNGAN PROV.KALTIM

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
				Dibuka sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Ditutup	
A	Rekomendasi Perijinan						
1	Dokumen Permohonan : - Rekomendasi Izin Trayek Operasi - Rekomendasi Crossing/Izin Perlintasan - Kartu Pengawasan - Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kota/Kab dalam provinsi - Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat - Rekomendasi Izin Usaha Bongkar Muat Barang - Rekomendasi Izin Usaha Perairan / Pelabuhan - Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi - Rekomendasi Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut - Rekomendasi Izin Usaha Tally Mandiri - Rekomendasi Izin Usaha Depo Peti Kemas - Rekomendasi Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan	1).Pasal 6 ayat 3 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					Rekomendasi dapat dibuka jika ijin telah selesai dikeluarkan.
	- Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota dalam provinsi > 7 GT - Rekomendasi Izin Trayek Angkutan - Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Penyebrangan Lintas Kab/Kota dalam provinsi - Rekomendasi Izin Pengoperasian Angkutan Sungai Danau Penumpang Kapal/speedboat Antar Kab/Kota dalam provinsi < 7 GT - Rekomendasi Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau - Rekomendasi Izin SIUPAL Kantor Cabang - Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/speedboat Antar Kab/Kota dalam provinsi > 7 GT - Advis Terminal Khusus						

B Kepegawaian							
1	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Pemohonan Penghasilan Pegawai (KP4), Hasil check up kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, rekomendasi tim Etika, biodata elektronik PNS (database), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/ pegawai	1).Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2).UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai		Pegawai yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik.
2	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1).Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2).UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3).Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Negeri Sipil 4).Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 5).PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen			Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Pegawai yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik.
C Hukum							
1	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	1).Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2).UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3).UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 4).UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman			Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum		Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap

2	Dokumen Penawaran Penyedia Barang/ Jasa	1).Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2).Pasal 7 huruf b Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya			Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Sampai dengan selesainya proses pengadaan
3	Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa, termasuk sanggah banding	1).Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2).Pasal 7 huruf b Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya			Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Sampai dengan selesainya proses pengadaan
E TI							
1	Sistem Management Database	1).Pasal 17 huruf j UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2).Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			Penyalahgunaan oleh pihak lain.		Terbatas

Samarinda, Juli 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ketua,

Didy Rusdiansyah Anas Dani, SP-MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196406271990031006